

Restrukturisasi Sistem Dan Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Sektor Mikro

Siti Murtiyani¹

Email: smurtiyani@yahoo.com;

STEI Hamfara Yogyakarta

Abstraksi

Pengangguran dan kemiskinan merupakan problematika besar bagi suatu Negara, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi mengoptimalkan kinerja lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi terkait, bagaimana kerjasama sinergis itu akan mampu menguatkan program pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu mandiri dan berkelanjutan dengan keberhasilannya dalam mengelola unit usaha pada sektor riil. Metode yang digunakan adalah membentuk kelompok-kelompok unit usaha (*Cluster*) pada setiap unit usaha dan saling menguatkan antara kelompok dengan jaringan (*Networking*) yang terstruktur dan kokoh. Pendekatan program menggunakan model *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Participatory Action Research* (PAR), Pendekatan lokal terpusat (kelompok sasaran) dalam proses pendampingan bagi unit usahanya. Hasilnya penelitian berupa sistem yang terpadu serta strategi penguatan kerjasama sinergis dan berkesinambungan bagi Pemerintah, Bank Indonesia, Bank Syariah, Lembaga Pendidikan dan Lembaga sosial lainnya seperti BAZNAS, LAZIS, Dompot Dhuafa Republika dan organisasi sosial lainnya, serta memberikan rekomendasi agar setiap lembaga bisa mensinergikan program kerjanya agar lebih terstruktur dan terfokus pada program pemberdayaan masyarakat miskin.

Keywords: Restrukturisasi Sistem, Optimalisasi Program, Pemberdayaan Masyarakat, Sektor Mikro

Abstracs

Unemployment and poverty are major problems for a country, this study aims to provide solutions to optimize the performance of government agencies and related organizations, how this synergistic collaboration will be able to strengthen empowerment programs for the poor to be independent and sustainable with success in managing business units in real sector. The method used is to form groups of business units (clusters) in each business unit and mutually reinforcing between groups and networks (*Networking*) that are structured and strong. The program approach uses the *Participatory Rural Appraisal* (PRA) and *Participatory Action Research* (PAR) model, a centralized local approach (target group) in the mentoring process for its business units. The results of the research are in the form of an integrated system and strategies to strengthen synergistic and sustainable cooperation for the Government, Bank Indonesia, Islamic Banks, Educational Institutions and other social institutions such as BAZNAS, LAZIS, Dompot Dhuafa Republika and other social organizations, as well as providing recommendations so that each institution can synergize the program. work to be more structured and focused on empowerment programs for the poor.

Keywords: System Restructuring, Program Optimization, Community Empowerment, Micro Sector

¹ Dosen Tetap STEI Hamfara Yogyakarta

A. Latar Belakang Masalah

Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan hingga saat ini. Menurut survey yang dilakukan BPS Agustus tahun 2008, penduduk miskin di Indonesia mencapai 34,96 juta orang (15,42%) dengan komposisi 22.189.122 orang (63%) berada di desa dan 12.770.888 orang (37%) berada di kota. Jumlah pengangguran terbuka tercatat sebanyak 9,39 juta orang (8,48%) dari total angkatan kerja sekitar 111,4 juta orang. Dari jumlah tersebut merupakan penganggur terbuka yang berdomisili di pedesaan 4.186.703 orang (44,4%) dan di perkotaan 5.240.887 orang (55,6%). Dari jumlah 9,39 juta orang penganggur tersebut sebagian besar berada di perkotaan dan sebagian kecil lainnya di pedesaan. Latar pendidikan para penganggur tersebut bervariasi, 27,09% berpendidikan SD ke bawah, 22,62% berpendidikan SLTP, 25,29% berpendidikan SLTA, 15,37% berpendidikan SMK dan 9,63% berpendidikan Diploma sampai Sarjana.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia, diantaranya: *Pertama*, jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia, sehingga terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran diantara keduanya. *Kedua*, terjadinya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (*mis-match*). *Ketiga*, dilema adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan pendidikan tidak mampu terserap dunia kerja, bahkan untuk berusaha mandiri pun tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki ketrampilan yang memadai (*unskill labour*). *Keempat*, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan yang disebabkan oleh krisis global, dan *Kelima*, terbatasnya sumber daya alam di kota yang

tidak memungkinkan lagi warga masyarakat untuk mengolah sumber daya alam menjadi mata pencaharian.

Jumlah pengangguran di kota dan di desa yang masih cukup tinggi mengakibatkan munculnya masalah sosial dalam masyarakat yaitu masalah pergaulan bebas, kriminalitas, narkoba, premanisme dan masalah-masalah sosial lainnya. Apabila masalah sosial ini tidak segera diatasi akan mengganggu pelaksanaan pembangunan di segala bidang dan stabilitas nasional secara umum. Kejadian yang seperti ini akan menjadi suatu lingkaran sebab akibat yang berkepanjangan dan menjadi penyakit masyarakat yang sulit sekali dihilangkan, sehingga perlu dilakukan pemutusan lingkaran dengan program yang spektakuler dari pemerintah khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah di segala bidang, di setiap departemen baik di perkotaan maupun di pedesaan, tetapi program yang dilaksanakan belum mencapai sasaran yang optimal bagi masyarakat, diantaranya disebabkan, *Pertama* terjadinya kesenjangan antara kemampuan/ keahlian masyarakat dengan program yang disodorkan oleh pemerintah, sehingga program tidak bisa berjalan dengan benar dan cenderung gagal dilaksanakan, *Kedua*, kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap program yang dilaksanakan, sehingga program pemberdayaan masyarakat ini terhenti dan tidak ada tindak lanjut yang signifikan dalam pengelolaannya, *Ketiga*, budaya masyarakat setempat yang cenderung menggantungkan harapan yang selama ini sudah terbentuk, menghambat dalam proses mensukseskan program-program pemerintah, *Keempat*, kurang sinerginya program-program antar departemen/ lembaga pemerintah menyebabkan tidak

terkontrolnya program-program pemerintah dan cenderung mengalami kegagalan.

Kemiskinan yang merata di daerah-daerah diseluruh Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantara *Pertama*, pengetahuan dan keahlian masyarakat yang sangat kurang dalam mengelola sumber alam yang berlimpah, ini memunculkan kesenjangan antara keahlian dan kemampuan masyarakat dengan sumber alam yang berlimpah, sehingga seringkali terjadi justru merusak sumber alam yang ada tanpa mampu memperbaiki ekosistem bagi keberlangsungan produktifitas sumber alam tersebut. *Kedua*, infrastruktur jalan, transportasi, sarana prasarana umum, system komunikasi yang sangat kurang menyebabkan daerah-daerah menjadi terisolir, sehingga berdampak pada aspek pemasaran dan distribusi produksi, sehingga produk menjadi kurang dikenal dan laku dipasaran, karena penjualan hanya melingkupi wilayah daerahnya saja. *Ketiga*, faktor kekurangan modal yang dimiliki, menyebabkan masyarakat tidak mampu mengembangkan dan meningkatkan nilai dari sumber alam yang tersedia. *Keempat*, tingkat pendidikan rata-rata masyarakat sangat rendah dan kurangnya komunikasi, baik elektronik, media cetak menyebabkan ketertinggalan dalam segala bidang.

Dengan beragamnya permasalahan yang terjadi ini perlu upaya-upaya yang strategis dalam mengoptimalkan program-program pemberdayaan masyarakat dengan mensinergikan program-program antar departemen serta membentuk pola dan system yang kuat dalam kemlompok masyarakat dalam rangka program pengentasan kemiskinan sehingga keberlangsungan dan tercapainya tujuan program-program tersebut benar-benar optimal.

B. Identifikasi Masalah

perkotaan.

Berdasarkan pada uraian singkat di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola sumber alam di daerah-daerah.
2. Keterbatasan sumber alam yang ada di perkotaan.
3. Terbatasnya kemampuan manajemen dan penggunaan teknologi informasi modern serta akses informasi yang rendah.
4. Kemampuan pemasaran yang masih sangat terbatas dikalangan pengusaha kecil
5. Legalitas formal usaha dan perlindungan usaha belum memadai
6. Terbatasnya akses pembiayaan kepada lembaga keuangan ,khususnya perbankan syariah
7. Kurang sinergisnya lembaga-lembaga terkait dengan bank syariah dan organisasi masyarakat lainnya.

C. Literatur Review

Penelitian mengenai kemiskinan telah banyak dilakukan, secara umum mengenai kemiskinan bertujuan untuk mengidentifikasi dengan tepat siapa yang miskin, keadaan kemiskinan ataupun sebab terjadinya kemiskinan. Penelitian kemiskinan orang-orang asli pedalaman dan daerah-daerah terpencil tidak perlu lagi mengidentifikasi siapa yang miskin, karena masyarakat tersebut sudah dikenal sebagai masyarakat miskin. Dan tingkat kemiskinan sudah bisa diketahui melalui hasil Biro Pusat Statistik. Sedangkan pada masyarakat perkotaan cenderung labil dan tidak pasti mengenai tingkat kemiskinan, karena sifat masyarakatnya yang tidak menetap dan sering terjadi penambahan dan pengurangan penduduk di wilayah

Berdasarkan survey yang dilakukan
Biro Pusat Statistik (BPS) bulan Agustus

tahun 2008, sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pengangguran

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Pendidikan Sekolah Dasar ke bawah	2.543.751	27,09%
2	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.124.018	22,62%
3	Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.374.731	25,29%
4	Sekolah Menengah Kejuruan	1.443.243	15,37%
5	Pendidikan Diploma dan Sarjana	904.257	9,63%
Jumlah		9.390.000	100%

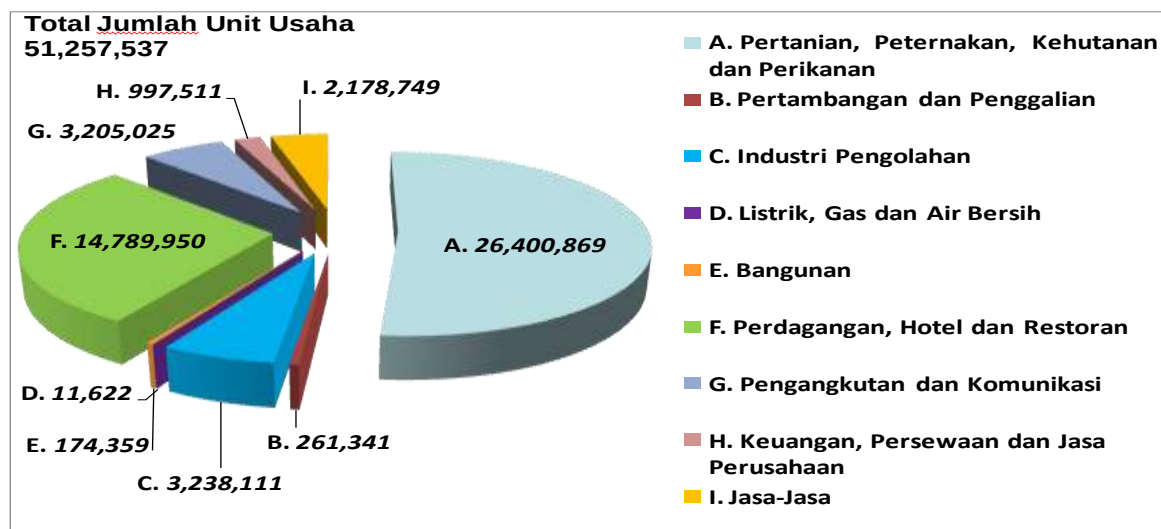
Sumber: Biro Pusat Statistik Tahun 2008

Dalam masalah pengangguran terbuka ini, solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pangsa lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja, permasalahannya penyerapan tenaga kerja ini memerlukan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan dan keahlian yang memadai bagi lapangan pekerjaan tersebut. Tetapi apabila lapangan pekerjaan itu ditingkatkan melalui peningkatan dan pertumbuhan dari unit-unit usaha yang sudah ada, tentu faktor kemampuan dasar bagi tenaga kerja bisa diberikan melalui training-training yang memadai bagi perusahaan tersebut.

Mengamati perkembangan dari jumlah unit-unit usaha yang ada di Indonesia sudah mencapai total

51,257,537 Unit Usaha yang terdistribusi pada kelompok bidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan mencapai jumlah terbesar yaitu 26.400.869 (51,50%), kelompok bidang Pertambangan dan Penggalan 261,341 (0,51%), kelompok bidang industri pengolahan berjumlah 3.238,111 (6,31), kelompok Listrik, Gas dan Air Bersih berjumlah 11,622 (0,02%), kelompok Bangunan berjumlah 174.359 (0,34%), kelompok perdagangan, hotel dan restoran berjumlah 14,789,950 (28,85%), kelompok pengangkutan dan komunikasi berjumlah 3,205,025 (6,25%), kelompok Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan berjumlah 997,511 (1,94%) dan terakhir kelompok jasa berjumlah 2,178,749 (4,25%), lebih ringkasnya lihat gambar. 1 berikut:

Gambar 1. Kelompok Bidang Unit Usaha Menurut Lapangan Usaha

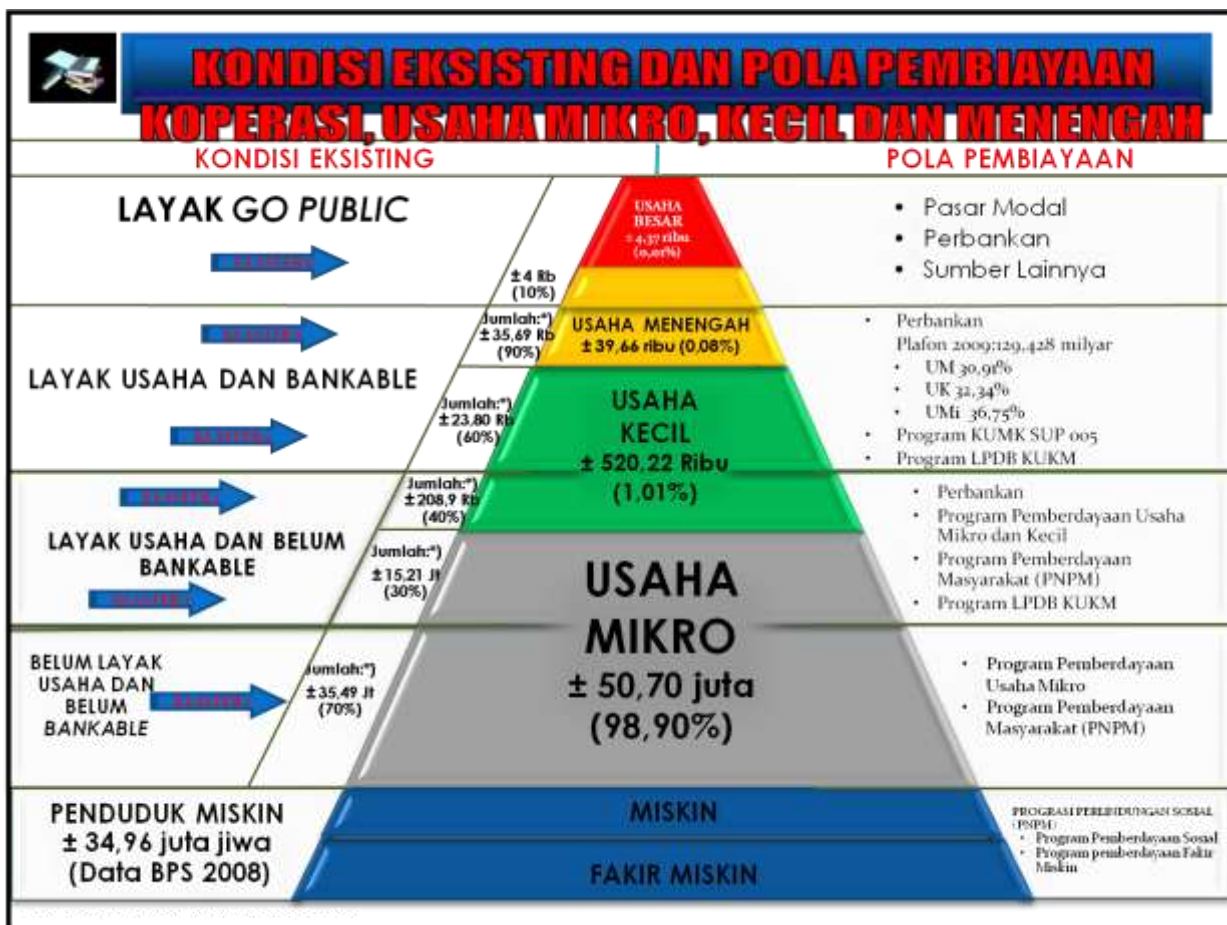


Sumber: BPS (2008)

Berdasarkan pada kelompok Unit Usaha yang ada, peta pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan unit-unit usaha dalam meningkatkan lapangan pekerjaan baru akan lebih mudah dilaksanakan. Disamping itu perlu melihat secara riil tingkat kemampuan dan kelompok Usaha berdasarkan pada pola pembiayaan yang diberikan kepada kelompok usaha tersebut antara lain: Kelompok usaha yang layak *go public* termasuk pada kelompok usaha besar yang pola pembiayaannya melalui Pasar Modal, Perbankan dan sumber lainnya hanya

berjumlah 39,66 ribu (0,08%). Pada kelompok Usaha yang layak usaha dan Bankable dikelompokkan dalam kelompok Usaha Menengah dan Usaha Kecil dengan pola pembiayaan perbankan dengan plafon sesuai dengan tingkat kebutuhan berjumlah 520,22 ribu (1,01%). Sedangkan kelompok Layak Usaha dan belum bankable dan belum layak usaha dan belum bankable total 50.70 juta (98.90%), dan penduduk miskin dan fakir miskin mencapai angka 34,96 juta jiwa.

Gambar 2. Kondisi Eksisting dan Pola Pembiayaan UMKM



Sumber: BPS (2008)

Dengan semakin jelasnya peta Unit Usaha dan tingkat kemampuan lapangan usaha-usaha tersebut akan lebih mudah dalam membuat perencanaan dalam rangka pemberdayaan bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang telah dilakukan

selama ini merupakan salah satu fokus dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan baru mencapai tahap permulaan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang telah memiliki mata pencaharian, tetapi belum mampu memberikan nilai tambah bagi

keluarganya, jadi hanya sebatas sebagai penopang kehidupan keluarga. Kelompok ini masuk dalam kategori belum mampu dan belum bankable yang rata-rata dilakukan oleh rumah tangga.

Program yang telah dilaksanakan belum mampu mencapai sasaran yang optimal dan belum meluas karena berbagai faktor antara lain:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan pendampingan dan pengawasan bagi pelaku bisnis, sehingga ketika dana yang digulirkan cair, selanjutnya tahap pendampingan dan pengawasan tidak berjalan secara optimal.

Salah satu dukungan untuk mengembangkan usaha mikro ini adalah pemberian kemudahan untuk mengakses pembiayaan mikro dari perbankan, yang kemudian didukung dengan pengembangan mekanisme pendampingan yang berkelanjutan, perluasan jaringan kerja dan kemitraan dengan dunia usaha, serta perlindungan hukum bagi setiap unit usaha, sampai unit bisnis tersebut berjalan dengan baik dan stabil.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang datanya diperoleh melalui Biro Pusat Statistik tahun 2008, dan dianalisis dengan melakukan pendekatan *Cluster* (kelompok) dalam proses pengembangan unit usahanya, sedangkan pendekatan program menggunakan model *Participatory Rural Appraisal* (PRA), Pendekatan lokal terpusat (kelompok sasaran) dalam proses pendampingan bagi unit usahanya.

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan *Cluster* dimana setiap unit usaha terutama usaha kecil dibentuk *cluster-cluster*, dimana masing-masing *cluster* memiliki kemampuan yang berbeda-beda serta pola pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan disesuaikan

2. Kurang sinergisnya kerjasama antara bidang, sehingga program-program pemberdayaan yang dilakukan tidak ada sinkronisasi dan berkelanjutan, karena faktor pergantian kebijakan dalam pemerintahan.
3. Bagi para pelaku bisnis yang sebagian besar masih belum memadai dalam kemampuan dan keahliannya belum mampu mengelola bisnisnya secara berkelanjutan.
4. Terputusnya rantai ekosistem dalam rantai bisnis mulai dari hulu ke hilir, karena salah satu atau sebagian yang lain terputus dalam pola pendampingan dan pengawasannya.

dengan *cluster* tersebut. Alur pola pendampingan yang dilakukan meliputi beberapa tahap berikut ini ²: (Gambar 3)

Gambar 3. Alur Pola Pendampingan



Gambar 4. Alur Pola Pendampingan



Dari alur pola pendampingan tersebut pada gambar 3 dan gambar 4 hal yang

² Murtiyani, Siti (2009) Laporan Interim Participatory Action Research pada pedagang Angkringan di Yogyakarta, hal 11

paling utama adalah pada proses pendampingan, monitoring dan evaluasi berkala, selanjutnya juga *Networking* kepada lembaga keuangan dan Investor. Karena pada titik ini proses berkesinambungan dalam pemberdayaan masyarakat akan bisa dilaksanakan dengan baik apabila pada tahap VII tersebut betul-betul dilaksanakan. Fakta yang terjadi, ketika pengguliran dana sudah dilakukan dan pelaporan anggaran/ dana bergulir dibuat, selanjutnya proses berikutnya tidak dilaksanakan lagi, karena sudah ditambahkan program-program lainnya tanpa menambahkan sumber daya yang memadai bagi proses pendampingan dan *Networking*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan melakukan kerjasama sinergis dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat lainnya, dimana target dan manfaatnya adalah:

1. Mampu meningkatnya skala usaha sesuai dengan target dan perencanaan yang matang dan terstruktur.
2. Unit-unit usaha yang ada mampu menggunakan teknologi tepat guna, skill dan manajemen usaha dalam pencapaian target tercapai
3. Perencanaan dan Pembinaan manajemen serta keagamaan yang berkelanjutan terhadap kelompok Unit Usaha.
4. Terbukanya akses permodalan melalui linkage program dengan lembaga Keuangan syariah mikro (Bank Syariah, BPRS, KJKS) dan Lembaga ZIS seperti Rumah Zakat, PKPU, dan LAZIS, BAZNAS, dll.
5. Memberikan suplemen bagi para pelaksana pemerintahan dan instansi terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan.

6. Meningkatkan kerjasama sinergis antara Lembaga-lembaga Pemerintah, dan Organisasi Sosial lainnya.

F. Analisis

Permasalahan yang mendasar dan seringkali dikeluhkan oleh usaha Kecil, mikro adalah permodalan dan ketiadaan agunan. Dalam permasalahan permodalan untuk UMKM, terdapat polemik yang berkepanjangan antara UMKM dan perbankan. Pada dasarnya terdapat perbedaan bahasa di antara mereka. Implikasinya, tingkat penyerapan UMKM terhadap permodalan perbankan masih rendah. Pihak perbankan menuding pihak UMKM tidak mempunyai kapasitas yang memadai, sementara pihak UMKM mengklaim bahwa prosedur pencairan pembiayaan terlalu sulit untuk dicapai oleh mereka. Mereka menuduh perbankan tidak mempunyai keberpihakan kepada UMKM.

Bagaimana peran Pemerintah, perbankan syariah, lembaga-lembaga sosial, LAZIS, BAZNAS, BUMN dan Swasta, Perguruan Tinggi yang dalam kapasitasnya sebagai lembaga sekaligus lembaga yang bersifat sosial dalam mengangkat derajat kaum fakir dan miskin. Dari jumlah warga Negara Indonesia yang fakir dan miskin yang mencapai angka 34.96 juta, tentu ini menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Perbankan Syariah, KJKS dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Bagaimana peran perbankan syariah dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor mikro, dan usaha menengah lainnya. Karena dengan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro maka diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas dan pendapatan untuk meningkatkan konsumsi dan akhirnya mampu menabung untuk menciptakan system jaminan sosialnya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan.

Gambar 5. Stakeholders Pendampingan Unit Usaha



Dari gambar 5 di atas masing-masing lembaga memiliki peran yang strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan, disinilah sentral dari penanggulangan kemiskinan yang mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah disini bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator yang berusaha menciptakan iklim yang kondusif bagi berjalannya proses ini. Sementara unsur-unsur di luar pemerintah akan berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam suatu mekanisme pasar yang bersahabat (*friendly market mechanism*).

1. Peranan Bank Indonesia

Peran Bank Indonesia dalam hal ini adalah memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan pendidikan ketrampilan serta memberikan akses informasi yang berhubungan dengan Unit Usaha pada UMKM, dan yang lebih utama adalah bagaimana Bank Indonesia memberikan bantuan teknis lain berupa sumber daya manusia yang siap untuk melakukan proses pendampingan dan monitoring serta pembangunan *Net Working* bagi kepentingan pengembangan usaha Unit-Unit usaha yang didampingi, sehingga benar-benar mampu tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan.

Pertumbuhan dan perkembangan akan terlihat ketika proses pendampingan berjalan sesuai dengan tahap-tahap implementasi dan monitoring, serta evaluasi atas perkembangan usaha.

Peran strategis ini apabila diabaikan dan tidak didukung sepenuhnya maka program-program yang telah dijalankan akan terhenti hanya sampai pada proses penggalangan dana dan pemanfaatannya yang kurang optimal, sehingga pada akhirnya Unit Usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya, stagnan dan sebatas untuk bertahan hidup, meskipun ada juga Unit Usaha yang mampu mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Peranan Perguruan Tinggi

Peranan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan antara lain:

1. Melaksanakan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah kemiskinan serta memberikan kontribusi solusi yang strategis bagi pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Memberikan kontribusi dalam PAR (*Participatory action Research*), dimana para dosen dituntut untuk melakukan penelitian sekaligus berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui dana dari DIPA yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Dalam hal ini Program-program PAR seharusnya disinkronkan dengan program-program departemen lainnya dalam pemerintahan, sehingga tidak hanya sekedar melakukan penelitian, membuat laporan dan selesai. Tetapi bagaimana peran Perguruan Tinggi juga mampu menjadi pembina dan pendamping bagi komunitas masyarakat dalam upaya menciptakan kemandirian berkelanjutan, pemberdayaan komunitas usaha kecil, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan, keahlian dalam manajemen bisnis, administrasi keuangan sederhana dan keahlian lain yang diperlukan oleh komunitas masyarakat bisnis, sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh para dosen.

3. Peranan BUMN dan Swasta

Peran BUMN dan Swasta sangat diharapkan dalam pengentasan kemiskinan adalah pada pembangunan *networking* dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun jaringan sinergi bagi pengembangan industri-industri rumah tangga, khususnya dalam aspek pemasaran dan peningkatan kualitas produk yang diproduksi oleh unit usaha.

Peran penting lainnya adalah bagaimana sistem jaringan dari hulu ke hilir atau sebaliknya dalam rangka peningkatan produktifitas dan pengembangan jaringan pemasaran melalui unit-unit bisnis yang dikembangkan dalam jaringan pemasaran, sebagai suatu rantai nilai (*Value Chain*)

yang tidak terputus dalam menghidupkan unit bisnis yang ada dalam *networking* tersebut.

Peran Swasta dalam rantai nilai ini sebagai mitra bisnis yang potensial dalam pengembangan jaringan, serta memberikan kontribusi yang luar biasa dalam mendukung terbentuknya siklus kehidupan bisnis dalam rantai nilai yang dikembangkan dalam jaringan bisnis bagi komunitas masyarakat, dimana antara BUMN, swasta dan komunitas masyarakat bisnis terjadi hubungan bisnis yang saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling menjaga rantai nilai yang sudah terbentuk.

4. Peranan Perbankan Syariah

Seiring dengan perkembangan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) di kalangan masyarakat, berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi perlu mendapat perhatian tersendiri oleh kalangan perbankan syariah, sebab hal ini merupakan kerja besar yang harus diselesaikan khususnya permasalahan Unit usaha masyarakat. Adapun beberapa permasalahan yang secara umum terjadi dalam UMKM adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya fasilitas pembiayaan mikro bagi UMKM dari perbankan syariah, walaupun ada melalui kerjasama dengan KJKS sebagai mediator dalam pembiayaan.
2. Prosedur dan persyaratan pembiayaan perbankan syariah relatif rumit dan birokratis
3. Ketidakmampuan dalam menyediakan jaminan tambahan untuk memperoleh pembiayaan
4. Tingginya rate bagi hasil pada perbankan syariah terutama untuk modal investasi
5. Terbatasnya jangkauan pelayanan pembiayaan perbankan syariah di daerah-daerah

6. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah masih sangat rendah, khususnya pada aspek pembiayaan dan investasi.

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas Perbankan Syariah bisa memberikan kontribusi yang sangat besar dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui:

1. Pemberian fasilitas pembiayaan mikro bagi UMKM yang telah memiliki kemampuan dan pemahaman tentang perbankan syariah, dengan memanfaatkan dana Qhardul Hasan dan dana modal lainnya.
2. Memberikan kemudahan dalam prosedur dan persyaratan dengan standart minimal serta kemudahan akses perbankan syariah dengan bekerjasama antara KJKS, UMKM dan Organisasi masyarakat lainnya.
3. Memberikan kemudahan dalam masalah jaminan dengan memberikan solusi jaminan dari kelompok unit bisnis yang dibentuk dan organisasi komunitas masyarakat yang berkembang dalam suatu wilayah tertentu.
4. Memberikan bagi hasil yang wajar serta dipahami oleh komunitas masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan pada perbankan syariah.
5. Memberikan layanan jangkauan yang lebih luas serta bekerjasama dengan KJKS dan Kantor-kantor cabang di daerah-daerah.

Peranan perbankan syariah dalam pengentasan kemiskinan ini akan terwujud apabila ada kekuatan (*Power*) yang luar biasa dari pihak Bank Indonesia sebagai induk bagi perbankan syariah dalam mendukung dan memberikan peraturan perbankan dari aspek kemudahan akses, regulasi, birokrasi, dan kebijakan pemberian pembiayaan bagi usaha menengah, kecil dan mikro. Apabila hal ini bisa diwujudkan, akan memberikan angin

segar bagi UMKM dalam mengembangkan usaha dan produktifitasnya.

5. Peranan Pemerintah

Pemerintah memiliki kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi bagi kesejahteraan masyarakatnya, sehingga apabila kemiskinan masih ada di bumi Indonesia ini, maka dosa pemerintah akan selalu bertambah apabila peranan pentingnya dalam pengentasan kemiskinan tidak dijalankan secara serius dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah sangat strategis dan memiliki kekuatan yang luar biasa bagi pelaksanaan setiap program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang telah dibentuk dengan serangkaian program kerja yang telah disusun sekaligus dengan rancangan anggaran belanja yang mencerminkan kepedulian Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Koordinasi dan sinkronisasi program kerja setiap lembaga pemerintah harus dilakukan dalam rangka optimalisasi program dan tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kekuatan dan kekuasaan seorang Pemimpin harus mampu mengkoordinasi dan terbentuknya jalinan kerjasama yang sinergis antara lembaga-lembaga pemerintahan. Kerjasama yang dilakukan adalah melakukan sinkronisasi dan penyelarasan program-program kerja, sehingga antara program yang dilakukan bersifat saling menguatkan, mendukung dan melaksanakan program secara terstruktur dan terencana. Aktifitas yang dilakukan antara lembaga pemerintah meliputi: koordinasi program dan kegiatan, pembinaan berkelanjutan, pelatihan, pendampingan, intermediasi, fasilitasi dan akses pasar.

6. Peranan Lembaga Sosial Lainnya

Selain peran organisasi dan lembaga-lembaga tersebut di atas, lembaga-lembaga sosial lainnya seperti LAZIS, BAZNAS,

Dompot Dhuafa Republika, Rumah Zakat, dan lainnya berperan dalam mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah yang bisa didistribusikan melalui lembaga-lembaga sosial tadi dengan mensinergikan dan mensinkronkan program-program kerjanya, sehingga program-program yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan tepat sasaran. Karena dalam lapangan terjadi pola kerja sendiri-sendiri dan tidak terstruktur, sehingga sasarannya bertumpuk pada satu area tertentu.

Dalam pelaksanaan program kerja sebaiknya dilakukan dengan pola mendidik dan meningkatkan kualitas dari para penerima zakat, infak dan sodaqah, sehingga pemberian bantuan ini lebih bermakna pada proses pembelajaran dan meningkatkan dan merubah pola berpikir, berawal dari seorang *mustahiq* (penerima zakat) setelah dilakukan pembinaan dan peningkatan kualitas dan produktifitas dalam usaha bisnis akhirnya menjadi seorang *Muzaki* (pembayar zakat). Dan akan lebih bagus kalau dilakukan sinkronisasi program dengan organisasi dan lembaga-lembaga lainnya.

Terkait dengan lembaga-lembaga tersebut di atas, maka perlu adanya peran KKMB (Kelompok Konsultan Mitra Bank), dimana KKMB diperlukan untuk meningkatkan daya serap UMKM terhadap *business plan* perbankan syariah ke sektor usaha yang produktif dalam masyarakat. KKMB akan diisi oleh para konsultan/pendamping yang ada di departemen teknis, BUMN dan swasta, Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat, dan lembaga penelitian.

KKMB ini perlu dukungan dari pihak pemerintah melalui instansi sektoral yang selama ini telah menyelenggarakan program pendampingan. Seperti Penyuluh Pertanian Lapangan dari Departemen Pertanian, *business development service* untuk Sentra UKM dari Kementerian

Koperasi dan UKM, Petugas Lapangan Keluarga Berencana dari BKKBN, Fasilitator pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dari Depkimpraswil, Konsultan Pendamping pada Lembaga Ekonomi Pemberdayaan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPPM3) dari Departemen Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya.

Para KKMB ini nantinya akan bergerak untuk mendampingi usaha mikro dan kecil dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, khususnya dalam memperoleh akses permodalan dari perbankan. KKMB diharapkan mampu menjadi jembatan bagi "perbedaan bahasa" antara usaha mikro dan kecil dengan perbankan syariah, karena KKMB telah dibekali dengan kemampuan teknis keuangan perbankan syariah. Keterlibatan perbankan syariah dalam pemberdayaan KKMB sangat diperlukan mengingat hubungan antara UMKM, KKMB, Perbankan bersifat *Trust*. Dan kepercayaan dibentuk dengan jalan bekerja secara bersama-sama.

Permasalahan yang timbul dengan adanya KKMB adalah permasalahan sumber daya manusia yang memahami aspek syariah dalam perbankan syariah, hal ini terbukti dari program yang telah dijalankan masih bersifat umum dan menggunakan mitra bank umum pada berbagai wilayah, sehingga ini memerlukan penanganan yang khusus bagaimana memberikan nilai tambah bagi KKMB dalam masalah pemahaman terhadap aplikasi syariah.

Disamping permasalahan sumber daya manusia yang terbatas, juga masih kurangnya tenaga-tenaga yang memahami konsep dan program UMKM dan Pemberdayaan masyarakat serta program pengentasan kemiskinan ini, sehingga perlu dilakukan penambahan armada yang kuat dan memiliki komitmen yang kuat dalam

program ini serta memahami prinsip-prinsip syariah.

Pendekatan yang bisa dilakukan dalam mensinergikan Lembaga Pemerintah dengan organisasi swasta serta organisasi sosial lainnya yaitu:

1. Pendekatan Program Pendampingan

Pendekatan program menggunakan model *Participatory Rural Appraisal* (PRA), Pendekatan lokal terpusat (kelompok sasaran). Secara teknis operasional pendekatan ini menggunakan objek kelompok sasaran. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan supaya terjadi proses akselerasi dalam pencapaian kemandirian sikap dan menumbuhkembangkan sifat *enterpreunership* di anggota kelompok sasaran. Setiap Kelompok terdiri dari 5 – 10 unit usaha/ perorangan. Kelompok sasaran inilah yang sebetulnya sebagai pelaku dalam mencapai target dan tujuan yang akan dicapai, karena merekalah yang nantinya akan merencanakan, mengorganisasikan, mengevaluasi, dan monitoring dengan didampingi oleh seorang pendamping lapangan yang bertugas mengarahkan, mendampingi, dan ikut dalam proses perencanaan, mengorganisasi dan evaluasi.

Salah satu tugas utama seorang pendamping lapangan yaitu membina ahlaq, moral dan aqidah kelompok sasaran sehingga kelompok sasaran akan mendapatkan multi manfaat, dunia dan akhirat. Kemanfaatan dan kesejahteraan hidup ini tentu menjadi tujuan utama dari program pendampingan terhadap komunitas bisnis dalam masyarakat.

2. Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR)

Pendekatan ini melibatkan para pendidik (Dosen) dan Mahasiswa tingkat akhir dalam memberikan pendampingan dan monitoring bagi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat komunitas dan

kelompok usaha yang dikembangkan. Peran aktif dalam kegiatan penelitian sekaligus melakukan tindakan langsung (*action*) menjadi sangat efektif dan tepat sasaran, karena secara langsung terjun di komunitas masyarakat serta mengetahui kekuatan dan kekurangan komunitas masyarakat yang dihadapinya.

Pendekatan ini dilakukan oleh para pendamping secara berkesinambungan dalam periode waktu tertentu mengikuti tahap-tahap implementasi yang dilakukan serta monitoring program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Proses monitoring dan implementasi ini dilakukan sampai pada tahap kemandirian dan kemampuan melanjutkan usaha dengan jaringan sinergi yang kuat yang telah dibentuk selama masa pendampingan. Sehingga setiap permasalahan yang muncul pada para pengusaha akan bisa diakomodir oleh kelompok dan diselesaikan melalui organisasi kelompok tersebut.

3. Program Layanan Pendampingan Meliputi

a. Layanan Informasi

Pemanfaatan dan penyediaan informasi peluang pengembangan usaha

b. Layanan Konsultasi

Strategi ini lebih pada *need assessment* masalah-masalah yang dihadapi dan alternatif pemecahan dalam bisnis

c. Layanan Pelatihan

Strategi yang dilakukan adalah peningkatan kemampuan kewirausahaan dan skill bagi para pengelola unit usaha.

d. Layanan Bimbingan Strategi ini lebih difokuskan pada ;

- 1) Bagaimana memacu prestasi usaha
- 2) Bagaimana cara menyusun neraca rugi/laba dengan mudah dan benar
- 3) Bagaimana menentukan jenis dan kualitas produk

- 4) Bagaimana teknik memilih bahan baku yang bermutu
 - 5) Bagaimana desain produk yang menarik dan marketabel
 - 6) Bagaimana membentuk *branch image*
- e. Layanan dalam Memperluas Pasar adalah;
- 1) Bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah ada
 - 2) Bagaimana melakukan ekspansi pasar
 - 3) Bagaimana membentuk Networking pemasaran
 - 4) Bagaimana mengenali keinginan konsumen
- f. Layanan dalam Penguatan Organisasi dan Manajemen
- Penguatan management organisasi kelompok dan *teamwork*
- g. Layanan Pengembangan Teknologi Tepat Guna berbasis potensi lokal
- h. Layanan Proposal Pengembangan Usaha untuk mendapatkan kesempatan dalam menambah modal dalam plafond yang lebih *besar* (Sinergi dengan Perbankan Syariah/BMT/Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Lembaga ZIS)

Kerjasama sinergis ini sebagian sudah dilaksanakan oleh beberapa bidang kementerian antara lain bidang kelautan, pertanian, perkebunan, dan lembaga lainnya, tetapi dari aspek pelaksanaan pendampingan masih juga belum dilaksanakan dengan baik, misalnya: proyek perkebunan penanaman pohon Cacao (Coklat) di daerah Kulonprogo, karena proses pendampingan tidak optimal, maka sampai pohon cacao sudah mau mati, tidak ada tindak lanjut dari pendampingnya, dan masyarakat penerima tugas menanam Cacao hanya membiarkan tanaman tersebut tanpa tahu bagaimana mengatasinya, karena sibuk dengan mencari penghasilan tambahan lainnya.

Pada bidang kelautan misalnya di wilayah Irian Jaya yang merupakan sentra rumput laut, ketika dana telah bergulir, rumput laut telah ditanam dan menghasilkan, kemudian rumput laut tersebut dipanen semuanya tanpa sisa sedikitpun untuk bahan bibit tanaman rumput laut, semua hasilnya dijual dan masyarakat berharap lagi pada bantuan pengguliran dana lagi. Hal seperti ini diakibatkan dari proses pendampingan yang tidak berjalan sesuai dengan program kerja yang dilaksanakan.

Pada bidang perkebunan kopi di Jayapura mengalami nasib yang sama, proses pendampingan tidak berjalan, maka perkebunan kopi yang penuh dengan rumput-rumput liar tidak bisa berbuah dengan baik dan tinggal menunggu kematiannya, karena tidak ada pendampingan bagaimana melatih masyarakat pekebun kopi untuk merawat kebun kopinya, menyiangi rumput dan memberikan suplemen pupuk agar kebun kopi tumbuh subur dan memberikan hasil yang optimal.

Dari beberapa contoh riil tersebut penulis mencoba memberikan gambaran bahwa program yang telah dijalankan sampai tahap pengguliran dana, sementara proses pendampingan dan penguatan komitmen untuk berkembang bagi masyarakat akan menyebabkan program ini akan berjalan sia-sia dan mubadzir, karena dana yang telah dikeluarkan hanya habis dimakan pengelola unit bisnis atau karena rusak.

Secara garis besar team KKMB dengan kerjasama sinergisnya akan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pengentasan kemiskinan, dengan ketentuan bahwa rambu-rambu kerjasama yang telah dilakukan benar-benar dapat dilaksanakan. Terutama pada tahap pendampingan dan *Networking* sampai pengelola unit bisnis benar-benar mampu

mandiri dan mampu melanjutkan usaha dengan lebih baik.

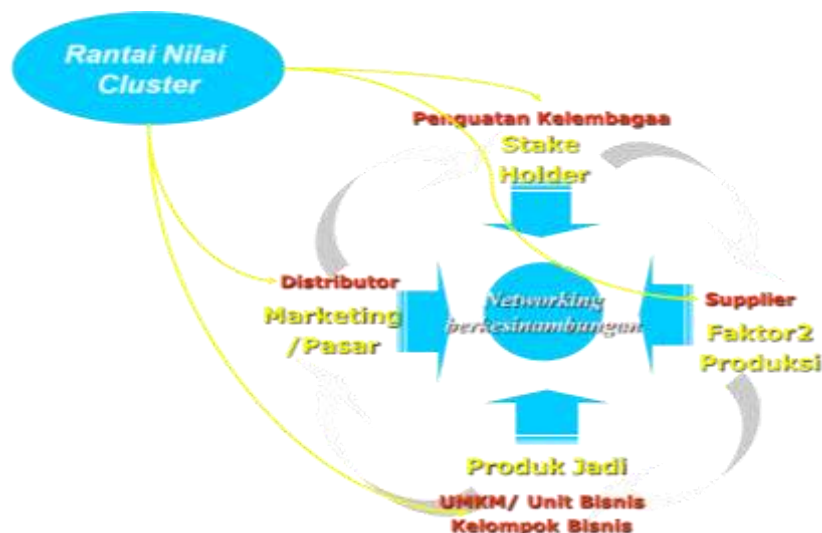
Standart pengukuran untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemampuan pengelola unit usaha perlu dibuat dengan melihat fakta yang ada, sehingga bisa menentukan kapan saatnya unit bisnis itu disapih (dilepas) secara mandiri mengelola unit usaha yang dijalankan. Demikian juga dalam pembangunan jaringan (*Networking*) perlu dipantau dan didampingi sesuai dengan programnya agar memiliki kekuatan dalam mengembangkan unit usahanya. Meskipun dalam hal ini perlu target waktu khusus masa pendampingannya.

4. Pendekatan Rantai Nilai (*Value Chain*) Cluster

Pendekatan rantai nilai terhadap *cluster-cluster* merupakan pendekatan yang potensial bagi menjamin kelangsungan proses pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan bagi kaum dhuafa. Rantai nilai yang dikembangkan dan dibentuk, akan memberikan semangat kerjasama dan saling membutuhkan dalam suatu rangkaian aktifitas bisnis bagi kelompok bisnis yang dibentuk. *Networking* yang telah dibentuk ini diharapkan bisa berjalan secara terus menerus dalam suatu rangkaian bisnis, dimana antara kelompok bisnis satu dengan kelompok bisnis lain saling membutuhkan dan saling menguatkan bagi keberlangsungan unit usahanya.

Sebagai gambaran sederhana bisa dilihat ilustrasi pada Gambar 6 berikut ini:

Gambar. 6 Rantai Nilai Cluster



Dalam rangkaian rantai nilai pada gambar 6 menunjukkan bahwa unit bisnis para supplier sebagai penyedia faktor-faktor produksi kepada UMKM dan kelompok bisnis lain yang memproduksi suatu komoditi. Dalam hal ini sebagai unit usaha produksi tidak khawatir akan kekurangan faktor-faktor yang telah tersedia dalam rantai nilai. Selanjutnya ketika barang persediaan hasil produksi telah tersedian, sudah ada pihak distributor, pemasar dan pedagang lainnya

yang menjualkan barang-barang hasil produksi tersebut, sehingga para produsen dalam kelompok bisnis tersebut tidak khawatir jika barang tidak laku terjual.

Stake holder yang meliputi perbankan syariah, KJKS, organisasi swasta, BUMN, dan organisasi sosial lainnya memiliki peranan penting dalam rantai nilai tersebut sebagai sarana penguatan kelembagaan bagi keberlangsungan unit-unit bisnis yang terangkai dalam kelompok. Jaringan

(*Networking*) ini dibentuk secara berkelanjutan untuk keberlangsungan cluster-cluster tersebut. Sehingga dengan jaringan kerjasama ini akan memberikan jaminan kesejahteraan bagi pelaku bisnis/ Usaha.

5. Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Cluster

Beberapa faktor penentu keberhasilan dari *cluster-cluster* yang sudah dibentuk antara lain:

- 1) Kerjasama antara UKM dalam cluster harus kuat, mulai dari penyediaan faktor-faktor produksi, pemasaran dan inovasi produk.
- 2) Adanya keterlibatan pihak luar seperti pemerintah, perguruan tinggi dan dinas instansi berkaitan dengan fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.
- 3) Memiliki jaringan kerjasama yang kuat dengan semua stake holder seperti Bank Syariah, akses pasar, supplier, distributor, dan mitra lainnya.
- 4) Kemampuan menjual produknya keluar dan mendapatkan input yang efisien dari luar, dimana semua itu ditentukan oleh semua jaringan dalam *cluster*.

Sedangkan faktor penentu kegagalan cluster yang sudah dibentuk dalam suatu komunitas masyarakat antara lain:

- 1) Tidak ada kerjasama antara pelaku usaha dalam cluster, serta tidak memfungsikan kluster yang seharusnya yaitu menciptakan keuntungan aglomerasi.
- 2) Tidak memahami dan tidak melihat adanya keuntungan jika mereka bekerjasama.
- 3) Tidak mengetahui bagaimana membangun jaringan kerjasama bisnis.
- 4) Tidak memiliki jaringan kerja eksternal antara lain dengan Bank Syariah, Lembaga keuangan bukan Bank, perusahaan besar lain, dan Akses pasar.

Faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan *cluster* tersebut digunakan sebagai dalam melaksanakan proses evaluasi dan monitoring proses pendampingan bagi UMKM dan *cluster-cluster* yang menjadi sasaran. Dengan demikian akan bisa cepat diketahui kemungkinan keberhasilan dan kegagalan *cluster* untuk diambil tindakan dan strategi yang tepat dalam mengatasi kemungkinan-kemungkinan kegagalan dari *cluster* tersebut.

G. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola sumber alam di daerah-daerah, ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan dan peningkatan kemampuan yang dilaksanakan oleh KKMB dan sinerginya dengan memanfaatkan fasilitas bantuan teknis dari Bank Indonesia.
2. Peningkatan kemampuan dan keahlian para pengangguran di perkotaan dengan melihat kebutuhan unit usaha diperkotaan akan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasinya.
3. Keterbatasan kemampuan manajemen dan penggunaan teknologi informasi modern serta akses informasi yang rendah, dilakukan dengan memberikan training teknologi informasi dan bentuk komunikasi lainnya, khususnya dalam upaya membangun *networking*.
4. Kemampuan pemasaran yang dikalangan pengusaha kecil dilakukan melalui pelatihan tehnik pemasaran, mempertahankan pelanggan dan membangun jaringan.
5. Perlu diberikan pelatihan dalam mengurus aspek legalitas formal usaha dan perlindungan usaha bagi keberlangsungan unit usaha.

6. Dalam hal terbatasnya akses pembiayaan kepada lembaga keuangan ,khususnya perbankan syariah, perlu dilakukan sinergi dan mediasi bagi mengakses pembiayaan pada bank syariah dengan standart yang telah ditetapkan.
7. Menjalin kerjasama sinergis antar lembaga-lembaga terkait dengan Pemerintah, Bank Indonesia, Bank syariah, Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat lainnya, sehingga bisa terbentuk kerjasama yang strategis dan berkesinambungan bagi pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
8. Faktor penentu keberhasilan dan kegagalan cluster perlu dibuatkan standart ukuran yang tepat menentukan keberhasilan dan kegagalan cluster, sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi

H. Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat, maka rekomendasi yang bisa penulis berikan antara lain:

1. Memperluas program PNPM –Mandiri khususnya kepada kelompok usaha mikro yg belum layak usaha dan belum bankable untuk memperoleh pembiayaan dengan lebih mudah.
2. Meningkatkan dan mempermudah penyediaan bantuan langsung berupa modal bagi usaha mikro yg dilaksanakan oleh kementrian terkait.
3. Mengembangkan model pembiayaan lainnya bagi usaha mikro melalui anggaran belanja sosial atau hibah dan dikelola dalam bentuk kelompok usaha ekonomi produktif dan memanfaatkan lembaga sosial seperti LAZIS, BAZNAS dan Dana Qhardul Hasan pada Perbankan syariah.
4. Mendorong penerbitan regulasi penyediaan dana APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, melalui kementerian dengan mensinergikan program-program kerja antara lembaga, dan Pemerintah pusat sebagai mediator yang berperan penting dalam pelaksanaan program ini.
5. Menambah penyediaan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi Unit Usaha bagi peningkatan keahlian dan kemampuan dalam mengembangkan dan inovasi produk yang bisa dikembangkan.

I. Referensi

- Biro Pusat Statistik 2008. Perkembangan beberapa indicator social ekonomi Indonesia. BPS: Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2009. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Kursus Wirausaha Kota
- Harun Hashim, 1991, Konsep dan pengukuran kemiskinan, seminar kebangsaan mengenai kemiskinan. Langkawi, Kedah. Kementerian Pertanian Malaysia. 13-15 Mei 1991.
- Hery Sasono, 2010, Laporan hasil Survey lapangan pada sentra rumput laut propinsi Jayapura.
- , 2010, Laporan hasil survey lapangan pada sentra kebun kopi di propinsi Jayapura.
- Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara KOperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 39/ Pert/ M.KUKM/XII/2007
- Siti Murtiyani, 2009, Laporan hasil survey kebun Cacao pada sentra kebun Cacao di Kulon Progo, Yogyakarta.
- , 2010, Laporan interim PAR (*Participatory Action Research*) pemberdayaan, pelatihan dan pendampingan pedagang angkringan di Yogyakarta